



PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH  
**INSAN MADANI**  
aman-lancar-barokah



**LAPORAN**

**KEBERLANJUTAN**

PERIODE TAHUN 2024



PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH  
**INSAN MADANI**  
aman - lancar - barokah



Laporan Keberlanjutan  
PT BPRS Syariah Insan Madani  
Tahun 2024



PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH  
**INSAN MADANI**  
aman - lancar - barokah



LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN BERKELANJUTAN  
PT BPR SYARIAH INSAN MADANI  
TAHUN 2024

Telah disusun Laporan Berkelanjutan PT BPR Syariah Insan Madani tahun 2024 sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Sukoharjo, 29 April 2025  
PT BPRS Insan Madani

Menyetujui

Hannanto  
Komisaris Utama

Emma Endang S.  
Komisaris

Sriwoto  
Direktur Utama

  

Bundiardjo Gunawan  
Direktur



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>2</b>
<b>BAB I STRATEGI KEBERLANJUTAN</b> .....	<b>3</b>
<b>BAB II IKHTISAR KINERJA ASPEK KEBERLANJUTAN</b> .....	<b>4</b>
A. Kinerja aspek ekonomi.....	4
B. Kinerja aspek sosial.....	4
C. Kinerja aspek lingkungan hidup.....	4
<b>BAB III PROFIL SINGKAT PERUSAHAAN</b> .....	<b>6</b>
A. Visi Misi dan nilai keberlanjutan BPRS.....	6
B. Profil BPRS.....	6
C. Jaringan kantor.....	7
D. Skala usaha.....	7
E. Produk dan layanan.....	9
F. Keanggotaan pada asosiasi.....	10
G. Perubahan struktur kepemilikan dan jaringan kantor.....	10
<b>BAB IV PENJELASAN DIREKSI</b> .....	<b>11</b>
A. Kebijakan merespon tantangan.....	11
B. Penerapan keuangan Keberlanjutan.....	12
C. Strategi pencapaian target.....	12
<b>BAB V TATA KELOLA KEBERLANJUTAN</b> .....	<b>14</b>
A. Uraian tugas Direksi, Dewan Komisaris serta satuan kerja penanggung jawab penerapan keuangan Keberlanjutan .....	14
B. Pengembangan kompetensi terkait penerapan keuangan Keberlanjutan .....	15
C. Prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko atas penerapan keuangan Keberlanjutan .....	15
D. Pemangku kepentingan .....	16
E. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan dan pengaruh terhadap penerapan keuangan Keberlanjutan .....	16
<b>BAB VI KINERJA KEBERLANJUTAN</b> .....	<b>18</b>
A. Kegiatan membangun budaya keberlanjutan.....	18
B. Kinerja ekonomi.....	18
C. Kinerja sosial .....	19
D. Kinerja lingkungan hidup .....	21
E. Tanggung jawab produk dan/atau layanan keuangan Keberlanjutan .....	22



## **BAB I**

### **STRATEGI KEBERLANJUTAN**

Dengan modal inti antara Rp6 milyar hingga Rp15 milyar maka BPRS Insan Madani (selanjutnya disebut BPRS) masuk dalam kategori BPRS KU 1 dimana sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Keberlanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, tahun 2024 adalah tahun pertama BPRS wajib melaporkan pelaksanaan Aksi Keuangan Keberlanjutan. Dengan berlakunya POJK tersebut maka BPRS senantiasa berkomitmen dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia yaitu terciptanya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kepentingan generasi selanjutnya.

BPRS senantiasa berupaya menjadikan prinsip Keberlanjutan dalam operasionalnya, sehingga dapat berperan aktif tidak hanya dalam pengembangan bisnis dengan tata kelola yang baik, namun juga untuk menyelaraskan peningkatan nilai bagi pemangku kepentingan sehingga memberikan gambaran akan tanggung jawab BPRS baik pada aspek ekonomi sebagai wujud dari keberlanjutan usaha, sekaligus pertumbuhan keberlanjutan antara BPRS dengan lingkungan di sekitar.

BPRS memiliki komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Keuangan Keberlanjutan, khususnya 8 (delapan) prinsip Keuangan Keberlanjutan yang telah dituangkan dalam Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Keberlanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, sebagai berikut:

1. Prinsip Investasi Bertanggung Jawab
2. Prinsip strategi dan praktik bisnis Keberlanjutan
3. Prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup
4. Prinsip tata kelola
5. Prinsip komunikasi yang informatif
6. Prinsip inklusif
7. Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas
8. Prinsip koordinasi dan kolaborasi.



## BAB II IKHTISAR KINERJA ASPEK KEBERLANJUTAN

### A. KINERJA ASPEK EKONOMI

URAIAN	2024	2023	2022
<b>Kinerja internal (Rp jutaan)</b>			
DANA PIHAK KETIGA	36.580	28.766	30.483
PEMBIAYAAN DISALURKAN	43.649	40.781	30.160
Kredit Modal kerja	38.593	34.554	27.261
Kredit Investasi	2.305	996	775
Kredit konsumsi	2.751	5.231	2.124
PENDAPATAN	2.510	2.580	3.285
LABA BERSIH	-746	-1.115	245
<b>Kinerja bidang kredit (Rp jutaan)</b>			
Kredit UMKM	40.898	35.550	28.036
Non UMKM	2.751	5.231	2.124
Jumlah	43.649	40.781	30.160
<b>Jaringan kantor</b>			
Kantor Pusat	1	1	1
Kantor Cabang	0	0	0
Kantor Kas	3	3	3
Jumlah payment point	0	0	0
Jumlah kas keliling	0	0	0

Hasil kinerja aspek ekonomi salah satunya tercermin dari laba. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 BPRS membukukan kerugian namun kerugian pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 368.498.760 atau turun 33%.

### B. KINERJA ASPEK SOSIAL

Sebagai bentuk kepedulian BPRS kepada masyarakat atau lembaga nirlaba yang membutuhkan, selama tahun 2024, BPRS menyalurkan dana kebajikan kepada :

- 1) Lembaga pendidikan RA-MI Wasilatut Taqwa, Mejobo Kudus dalam rangka membantu biaya pembebasan tanah waqaf untuk lembaga pendidikan tersebut
- 2) Mushola Kampung Klinggen, Ngadirejo Kartasura yaitu membantu biaya pembangunan mushala tersebut
- 3) Masyarakat dan panti asuhan di lingkungan jaringan kantor BPRS dalam bentuk pembagian paket sembako

### C. KINERJA ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

Dampak langsung dan tidak langsung yang ditimbulkan dari kegiatan usaha BPRS terhadap lingkungan hidup terbilang sangat kecil relatif terbatas. Namun demikian, BPRS memiliki komitmen yang tinggi untuk terus menekan dampak operasional terhadap lingkungan hidup dan turut berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan dengan penggunaan energi listrik dan air, penggunaan kertas, BBM secara tepat guna serta upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kerja.



URAIAN	2024	2023	2022
<b>Kinerja internal</b>			
Penggunaan energi listrik (Rp jutaan)	48	43	48
Penggunaan BBM kendaraan (Rp jutaan)	75	74	64
Penggunaan BBM genset (Rp jutaan)	-	-	-
Penggunaan kertas (Rp jutaan)	18	18	17
<b>Kegiatan tanggung jawab lingkungan hidup</b>			
Realisasi dana kegiatan tanggung jawab lingkungan (Rp jutaan)	4	4	4

### BAB III

## PROFIL SINGKAT PERUSAHAAN

#### A. VISI, MISI, DAN NILAI KEBERLANJUTAN BPRS

##### 1. Visi dan Misi BPRS

###### Visi

adalah menjadikan BPRS Insan Madani menjadi pemimpin pasar BPR Syariah di Jawa Tengah yang sehat dan terpercaya.

###### Misi

memberikan kemudahan, manfaat dan mengembangkan nilai-nilai universal di bidang jasa perbankan syariah kepada masyarakat untuk kemajuan bersama

##### 2. Nilai Keberlanjutan BPRS

Budaya keberlanjutan diwujudkan melalui implementasi budaya kerja BPRS dengan menerapkan 9 prinsip budaya kerja yang terdiri dari nilai-nilai **BERIBADAH**, yaitu:

- a. Berani Bertanggung Jawab
- b. Efektif dan efisien
- c. Rasionalis
- d. Inovatif
- e. Berjiwa Pemimpin
- f. Aktif
- g. Disiplin
- h. Amanah
- i. Hasil

#### B. PROFIL BPRS

Nama Lengkap BPRS	: PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Insan Madani
Nama Panggil	: BPR Syariah Insan Madani
Alamat Kantor Pusat	: Jl. Ahmad Yani No 183 Ngadirejo, Kartasura, Sukoharjo Jawa Tengah
Telepon	: (0271) 782223
Tanggal Berdiri	: 15 Desember 1992
Jenis Usaha	: Perbankan
Status	: Perseroan Terbatas
Website	: bprsinsanmadani.co.id
Email	: insan_madani@ymail.com
Instagram	: @bprs_insanmadani
Modal Inti	: Rp8.544.439.041
Jumlah jaringan	: 1 kantor pusat, 3 kantor kas

**C. JARINGAN KANTOR**

**Kantor Pusat**

Jl. Ahmad Yani No 183 Ngadirejo, Kartasura, Sukoharjo Jawa Tengah  
 Telp. (0271) 782223

**Kantor Kas Gentan**

Jl. Gripit, Desa Gripit Rt.01 Rw.01 Banjarnangu, Banjarnegara  
 Telp.082.322.297.212

**Kantor Kas Solo**

Jl. Letjend. Karjono No.43 Parakancangah Rt.05 Rw.09, Banjarnegara  
 Telp. (0286) 592315

**Kantor Kas Bekonang**

Desa Singamerta Rt.04 Rw.02 Sigaluh, Banjarnegara  
 Telp. (0286) 593802

**D. SKALA USAHA**

Skala usaha BPRS dapat dilihat dari total aset, liabilitas/kewajiban, jumlah karyawan dan struktur kepemilikan BPRS dengan rincian sebagai berikut.

**1. Total Aset dan Total Liabilitas/Kewajiban**

Untuk aset dan kewajiban BPRS tercermin sebagai berikut.

Rp jutaan

No.	Uraian	2024	2023	2022
1.	Aset	55.677	50.190	46.460
2.	Kewajiban	47.133	40.899	39.055

**2. Jumlah Karyawan dan Manajemen**

Pada tahun 2024, jumlah karyawan dan manajemen BPRS tercatat sejumlah 33 orang dengan rincian sebagai berikut.

**Jumlah Karyawan dan Manajemen berdasarkan Jenis Kelamin**

Pada tahun 2022 jumlah karyawan laki-laki 19 karyawan atau 57,6%, dan jumlah karyawan perempuan 14 karyawan atau 42,4%.



### Jumlah Karyawan dan Manajemen berdasarkan Jabatan

Tabel data karyawan dan manajemen berdasarkan jabatan tahun 2024

Jabatan	Jumlah
Dewan Komisaris	2
Dewan Pengawas Syariah	2
Direksi	2
Manager	2
Kordinator	6
Staf	16
Non Staf	3
<b>Total</b>	<b>33</b>

### Jumlah Karyawan dan Manajemen berdasarkan Usia

Tabel data karyawan berdasarkan usia th. 2024

Keterangan	Jumlah Karyawan
18-25 tahun	5
26-35 tahun	14
36-45 tahun	5
46-55 tahun	7
≥55 tahun	2
<b>Total</b>	<b>33</b>

### Jumlah Karyawan dan Manajemen Berdasarkan Pendidikan

Tabel data karyawan berdasarkan tingkat Pendidikan th. 2024

Keterangan	Jumlah Karyawan
SMA	7
D3	2
S1	20
S2	2
S3	2
<b>Total</b>	<b>33</b>

### Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Ketenagakerjaan

Tabel data karyawan berdasarkan status ketenagakerjaan th. 2024

Keterangan	Jumlah Karyawan
Tetap	31
Tidak Tetap	2
<b>Total</b>	<b>33</b>



### 3. Persentase Kepemilikan Saham

Sampai dengan tahun 2024, jumlah Pemegang Saham BPRS sebanyak 1 badan usaha dan 3 orang pribadi dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel komposisi kepemilikan saham th. 2024

No	Pemegang Saham	Kepemilikan	
		Nominal	Prosentase
1	PT Podho Mulyo Santoso	4.750.000.000	95%
2	Tanu Tulus Kismanto	100.000.000	2%
3	Tan Taij Kie	100.000.000	2%
4	Hannanto	50.000.000	1%
<b>Total</b>		<b>5.000.000.000</b>	<b>100%</b>

### 4. Wilayah Operasional

Wilayah operasional BPRS berada di 2 kabupaten/kota di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta.

## E. PRODUK DAN LAYANAN

Bidang usaha adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan.
2. Menyalurkan pembiayaan bagi pengusaha dan/atau masyarakat.

### Produk Dana

1. Tabungan Wadiah  
Tabungan dengan akad wadiah. Tabungan nasabah ini bersifat titipan yang dapat ditarik dan disetor sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas Bank. Diperuntukkan bagi masyarakat umum, badan usaha, atau yayasan namun BPRS tidak memberikan bagi hasil atas simpanan nasabah tersebut.
2. Tabungan Madani  
Tabungan dengan akad mudharabah mutlaqah. Merupakan Produk simpanan dalam bentuk tabungan yang dapat disetor atau ditarik sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas Bank. Diperuntukkan bagi masyarakat umum, badan usaha, atau yayasan. BPRS akan memberikan bagi hasil atas simpanan nasabah
3. Tabungan Berjangka (Taka) Madani  
Tabungan dengan akad mudharabah mutlaqah. Tabungan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai perencanaan kebutuhan keuangan masa mendatang dengan lebih pasti, seperti ibadah haji/ umrah, qurban, pendidikan, investasi, dll dengan jangka waktu yang fleksibel dari 6 bulan sd 36 bulan dengan setoran bulanan yang terjangkau dengan bagi hasil yang kompetitif.
4. Deposito Madani  
Deposito Madani adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Jangka waktu yang disediakan fleksibel yaitu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Menggunakan akad mudharabah mutlaqah, BPRS akan memberikan bagi hasil

yang kompetitif atas deposito nasabah tersebut.

#### Layanan

1. *Pick up Service*  
Merupakan pelayanan kepada nasabah dimana petugas *BPRS* mendatangi tempat nasabah berada untuk melakukan transaksi perbankan (setoran tabungan, angsuran, deposito) dengan menggunakan mesin EDC.
2. *SMS Masking*  
Merupakan bentuk layanan informasi kepada nasabah atau karyawan melalui pesan singkat atau SMS atas nama *BPRS*.

#### Produk Pembiayaan

Adapun jenis pembiayaan yang dimiliki *BPRS* antara lain:

1. *Pembiayaan Usaha Madani*  
Produk pembiayaan yang diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat atas nama perorangan maupun badan hukum/perusahaan yang digunakan sebagai modal kerja.
2. *Pembiayaan Murabahah*  
Produk pembiayaan yang diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat atas nama perorangan maupun badan hukum/perusahaan yang digunakan untuk pembelian aset.
3. *Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)*  
Produk pembiayaan yang diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat atas nama perorangan untuk pembelian emas.
4. *Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)*  
Merupakan produk pembiayaan dengan tujuan refinancing atas aset yang telah dimiliki oleh nasabah untuk tujuan modal kerja, investasi atau konsumtif.
5. *Pembiayaan Multijasa*  
Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*).
6. *Pembiayaan Ijarah Mumtahiya Bittamlik (IMBT)*  
Pembiayaan yang diperuntukkan untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
7. *Pembiayaan Qard dan Pengurusan Haji*  
Pembiayaan yang diperuntukkan untuk menyediakan dana dan pengurusan ibadah haji. Dalam aplikasinya, pembiayaan ini digunakan untuk menyediakan dana talangan bagi masyarakat yang akan mendaftar ibadah haji guna mendapatkan porsi haji.

#### F. KEANGGOTAAN PADA ASOSIASI

*BPRS* tergabung dalam beberapa asosiasi perbankan antara lain:

1. Perhimpunan Bank Persektor Rakyat Syariah Seluruh Indonesia (*Himbarsi*) baik wilayah Soloraya maupun Pusat;
2. Asosiasi Bank Syariah Indonesia (*Asbisindo*) baik wilayah Soloraya maupun Pusat

#### G. PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN JARINGAN KANTOR

Di tahun 2024 tidak terdapat perubahan struktur kepemilikan *BPRS* dan tidak terdapat penambahan jaringan kantor baru.

## BAB IV PENJELASAN DIREKSI

### A. KEBIJAKAN MERESPON TANTANGAN

Sebagai salah satu penyedia produk dan layanan jasa perbankan di Indonesia, BPRS memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta turut berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Keberlanjutan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menjalankan perannya, BPRS menghimpun dana publik kemudian disalurkan kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi dan sosial, termasuk kegiatan-kegiatan usaha yang berwawasan sosial dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kebijakan untuk merespon penerapan keuangan Keberlanjutan, BPRS telah menyusun, menerapkan dan mengkaji ulang Rencana Aksi Keuangan Keberlanjutan (RAKB) yang memuat strategi jangka panjang untuk menerapkan keuangan Keberlanjutan pada tahun 2025 s.d. 2029. Strategi tersebut memuat sebagai berikut.

1. Memperluas efisiensi yang mendukung praktik-praktik ramah lingkungan hidup dalam operasional keseharian termasuk penghematan penggunaan kertas, konsumsi air, listrik baik di kantor pusat maupun kantor cabang dan kas.
2. Memperkuat tata kelola melalui penyesuaian *standar operating procedure* (SOP).
3. Meningkatkan pengembangan produk keuangan Keberlanjutan.
4. Meningkatkan transparansi kepada semua pemangku kepentingan dengan mematuhi peraturan yang berlaku.
5. Meningkatkan kegiatan edukasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat.

Tantangan dalam pelaksanaan keuangan Keberlanjutan dari internal yaitu pemahaman tentang isu lingkungan, ekonomi dan sosial dalam proses pengambilan keputusan, dan dari sisi eksternal yaitu terkait dengan kejelasan regulasi pelaksanaan keuangan Keberlanjutan. Dengan demikian, BPRS melihat perlunya edukasi bagi semua pemangku kepentingan dalam hal pemahaman tentang isu lingkungan, sosial dan tata kelola serta faktor ketidakpastian kondisi sosio-ekonomi dan regulasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan. BPRS akan terus berupaya mengembangkan pelaksanaan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola dalam proses bisnis dan menginternalisasikan kepada seluruh pihak internal di BPRS.

Dalam hal kepedulian terhadap lingkungan hidup, BPRS terus berupaya mengembangkan berbagai perangkat pendukung operasional yang mengurangi kuantitas penggunaan kertas dan mengefisienkan penggunaan energi listrik dan air. Selain itu, BPRS mengajak seluruh karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam program keberlanjutan melalui berbagai himbauan yang diterbitkan seperti; memastikan perangkat komputer dimatikan setelah karyawan selesai bekerja, menggunakan perangkat elektronik dan air sesuai kebutuhan.

## B. PENERAPAN KEUANGAN KEBERLANJUTAN

Pencapaian kinerja penerapan keuangan Keberlanjutan dibandingkan dengan target dijelaskan pada tabel berikut.

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan	Indikator keberhasilan	Penanggung Jawab Kegiatan	Realisasi
1.	Penyelenggaraan Workshop tentang konsep dasar Keuangan Berkelanjutan	Semester 1	Workshop Dilakukan sebanyak 1 kali bagi seluruh pegawai	Divisi Bisnis	Dilaksanakannya sosialisasi konsep dasar Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan pada tanggal 16 April 2024 Untuk seluruh karyawan dengan nara sumber internal perusahaan
2.	Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup	Semester 1	Peningkatan kesadaran Pegawai terhadap Lingkungan sekitar	Unit service	Surat Edaran yang berisi panduan penggunaan sumberdaya No 002/SE.DIR/IM/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024
3.	Penggunaan Tumbler dan Pengurangan Penggunaan Plastik	Semester 1	Penggunaan tumbler oleh seluruh karyawan sebagai tempat menyimpan air minum untuk menggantikan gelas plastik sekali pakai	Seluruh SDM	Digunakannya tumbler oleh seluruh karyawan

## C. STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

### 1. Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Keberlanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup

BPRS menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasional dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja BPRS. Bagi BPRS, manajemen risiko sangat membantu dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan strategis perusahaan.

Menyadari akan risiko-risiko yang dihadapi, BPRS secara proaktif berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan keandalan sistem manajemen risiko. Sistem manajemen risiko mencakup prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Penjelasan tentang pengelolaan risiko tersebut tertuang dalam Bab V Tata Kelola Keberlanjutan huruf C.



## 2. Pemanfaatan peluang dan prospek usaha.

Usaha BPRS berfokus pada penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dengan skala usaha mikro, kecil dan menengah. Beberapa peluang dan prospek usaha BPRS pada tahun 2024 antara lain:

### a. Dukungan pemerintah.

Pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan sektor UMKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Ini memberikan peluang bagi BPRS untuk menyalurkan pembiayaan dan dukungan keuangan kepada UMKM.

### b. Peningkatan akses keuangan.

Selain telah memiliki 4 jaringan kantor yaitu 1 kantor pusat dan 3 kantor kas, untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan, BPRS menyediakan jasa layanan pick up service dan transaksi menggunakan EDC dengan sistem *door to door*.

### c. Kemitraan.

BPRS dapat memanfaatkan kemitraan dengan UMKM untuk memberikan layanan keuangan yang lebih luas dan membantu pengembangan bisnis UMKM. Hal ini dapat meningkatkan pangsa pasar BPRS dan memperkuat posisi mereka sebagai mitra bisnis bagi UMKM.

Namun, BPRS juga harus siap menghadapi beberapa tantangan pada tahun 2025, seperti persaingan yang semakin kompetitif dengan lembaga keuangan lain, penurunan daya beli dan likuiditas masyarakat serta risiko kredit yang meningkat. Untuk mengatasi tantangan ini, BPRS perlu memiliki strategi bisnis yang kuat, manajemen risiko yang baik, dan berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan.

## 3. Penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan BPRS.

Di tahun 2024, dalam hal ekonomi, terjadi pemulihan ekonomi global pasca pandemi Covid-19. Selain itu, perang dagang antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China masih dapat mempengaruhi perdagangan global dan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, kemajuan teknologi seperti digitalisasi dan otomatisasi industri mungkin terus memengaruhi sektor ekonomi dan peluang investasi.

Dalam hal sosial, faktor-faktor seperti kebijakan imigrasi, ketimpangan sosial, dan perubahan demografi dapat terus memengaruhi situasi. Konflik dan krisis politik di beberapa negara dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi.

Dalam hal lingkungan hidup, masalah seperti perubahan iklim, degradasi lahan, dan polusi lingkungan dapat terus menjadi masalah yang besar dan mempengaruhi kesehatan manusia dan ekosistem. Namun, upaya global untuk memerangi perubahan iklim dan melindungi lingkungan dapat terus berkembang dan memengaruhi kebijakan dan investasi di sektor-sektor tertentu.

## BAB V TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

### A. URAIAN TUGAS DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN UNIT KERJA PENERAPAN KEUANGAN KEBERLANJUTAN

Seluruh unit kerja BPRS memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan aspek berkelanjutan. Adapun rincian unit kerja berikut dengan pejabat yang terkait dengan Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Tugas dan Tanggung jawab
1	Dewan Komisaris	Bertanggung jawab terhadap Pengawasan Penyusunan Rencana & Pelaksanaan Program Aksi Keberlanjutan.
2	Direksi	Bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Program Aksi Keberlanjutan secara keseluruhan.
3	Unit Service	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengusulkan program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan BPRS dari divisi/unit kerjanya</li> <li>2. Melaksanakan penerapan Program Aksi Keuangan Berkelanjutan BPRS, diantaranya pelaksanaan program <i>paperless</i> dengan digitalisasi data/berkas, monitoring penggunaan BBM, air, listrik, dan telepon</li> <li>3. Rekap Realisasi Penyaluran Pembiayaan kepada Kegiatan Usaha Kategori Berkelanjutan</li> <li>4. Memberikan <i>support</i> penyusunan rencana anggaran kegiatan.</li> <li>5. Melakukan pencatatan transaksi atas pelaksanaan program aksi keuangan Keberlanjutan</li> </ol>
4	Unit Bisnis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memproyeksikan pertumbuhan penyaluran dana.</li> <li>2. Merealisasikan penyaluran dana.</li> <li>3. Pelaporan realisasi penyaluran dana.</li> <li>4. Mengelola pelaksanaan program aksi keuangan Keberlanjutan di bidang pembiayaan.</li> </ol>
6	PE Kepatuhan dan Risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana dan pedoman terkait Aksi Keuangan Berkelanjutan</li> <li>2. Melakukan monitoring risiko kredit dan risiko lainnya terkait penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank</li> <li>3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program aksi keuangan Keberlanjutan terkait dengan kesesuaian ketentuan</li> </ol>
10	PE Audit Internal	Memonitoring dan memeriksa kebenaran pelaksanaan program aksi keuangan Keberlanjutan.

## B. PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERKAIT PENERAPAN KEUANGAN KEBERLANJUTAN

Bank menargetkan secara bertahap seluruh karyawan telah mengikuti pelatihan atau sosialisasi keuangan berkelanjutan. Pentingnya Bank dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karyawan sesuai dengan tujuan dan arah organisasi bisnis Bank, sehingga dapat terus bersaing dan kompetitif dengan kondisi pasar yang ada.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas SDM, BPRS telah melakukan :

- 1) Peningkatan kualitas karyawan dengan melakukan pelatihan/in house training untuk meningkatkan wawasan, analytical thinking, dan memperkuat team work.
- 2) Kesuaian jumlah pejabat dan karyawan, yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan bisnis BPRS, agar selaras dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku.
- 3) Evaluasi kualitas karyawan serta melakukan promosi, rotasi, dan mutasi dalam rangka penyegaran dan memperdalam kemampuan, kompetensi serta peningkatan ethos kerja dalam organisasi BPRS sehingga mendukung keuangan berkelanjutan.
- 4) Rencana pelatihan secara terjadwal yang berjenjang dan terstruktur sehingga tercipta kualitas SDM yang unggul

## C. PROSEDUR IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RISIKO ATAS PENERAPAN KEUANGAN KEBERLANJUTAN

### 1. Tata Kelola Risiko

- a. Penunjukan satuan kerja/fungsi pengelola keuangan Keberlanjutan.
- b. Menerapkan risk appetite dan risk tolerance penyaluran pembiayaan kepada kegiatan usaha kategori Keberlanjutan.
- c. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki *awarenes* dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko reputasi.
- d. Penanganan yang baik atas setiap berita terkait dengan bank dan selalu dilakukan klarifikasi pada kesempatan pertama agar berita yang bersifat negatif tidak membahayakan bisnis bank.
- e. Penetapan rencana aksi keuangan Keberlanjutan dan rencana bisnis bank untuk mencapai target yang telah ditentukan.
- f. Penetapan konsistensi dalam menerapkan strategi bisnis, program bisnis dan produk bisnis yang lebih komprehensif untuk mewujudkan kinerja yang baik.
- g. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki peran dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko dan tata kelola BPRS dengan melakukan sosialisasi, evaluasi melalui visitasi maupun peran PEAI.

### 2. Kerangka Manajemen Risiko

Menyadari akan risiko-risiko yang dihadapi, BPRS secara proaktif berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan keandalan sistem manajemen risiko. Sistem manajemen risiko mencakup prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

#### a. Identifikasi

BPRS melakukan proses identifikasi seluruh sumber potensi risiko yang potensiap pada produk dan aktivitas BPRS, termasuk risiko pada produk baru. Proses ini dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.



- b. Pengukuran  
BPRS melakukan pengukuran risiko untuk mengetahui profil risiko yang menggambarkan efektivitas penerapan manajemen risiko. Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. BPRS menggunakan metode yang ditetapkan oleh OJK untuk pengukuran risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko strategik, serta perhitungan modal sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku.
  - c. Pemantauan  
BPRS melakukan pemantauan penerapan strategi manajemen risiko, sesuai rekomendasi dari Komite/PE Manajemen Risiko dan disetujui oleh Direksi, serta pemantauan posisi/eksposur risiko. Apabila terdapat perubahan kegiatan usaha BPRS, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material, maka BPRS melakukan penyempurnaan proses pelaporannya.
  - d. Pengendalian  
BPRS menetapkan dan menjalankan langkah-langkah pengendalian manajemen risiko untuk memastikan agar semua aktivitas Bank tidak akan menimbulkan konsekuensi kerugian yang melebihi kemampuan BPRS atau membahayakan kelangsungan usaha BPRS. BPRS mengupayakan agar potensi kerugian yang mungkin timbul dapat diminimalkan melalui beberapa cara, termasuk metode mitigasi risiko dan/atau penambahan modal BPRS.
3. Sistem Pengendalian Risiko
- a. Kecukupan sistem pengendalian internal.
  - b. Kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam BPRS baik oleh PE Kepatuhan dan Risiko maupun PEAI.
  - c. Pemantauan terhadap setiap pelaporan yang wajib dilaporkan ke OJK/otoritas lain dimana kegiatan pemantauan tersebut telah menjadi agenda rutin di dalam kerangka kerja perbaikan tata kelola perusahaan.
  - d. Satuan kerja kepatuhan secara rutin dan berkesinambungan melakukan koordinasi dengan satuan unit kerja terkait dalam rangka mengawal proses dan monitoring pemenuhan kewajiban-keajiban bank kepada OJK atau otoritas lain atas terkaitnya ketentuan baru dari OJK atau otoritas lain.
  - e. Sistem pengendalian risiko dengan cara saling berkoordinasi antara unit kerja terkait sehingga diharapkan mendapatkan hasil pengendalian risiko yang memadai.

#### **D. PEMANGKU KEPENTINGAN**

Pada prinsipnya pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang berhubungan dan berpengaruh pada kegiatan usaha dan keberlanjutan BPRS secara signifikan. BPRS selalu memastikan terselenggaranya hubungan yang baik dengan Pemangku Kepentingan dan memandang keterbukaan informasi dan penyampaian informasi yang komprehensif merupakan bagian dari hak pemangku kepentingan. Sarana yang digunakan oleh BPRS dalam menyampaikan informasi secara internal adalah melalui aplikasi informasi internal dan rapat, sedangkan secara eksternal melalui aktivitas perbankan, pertemuan bisnis, sosialisasi, website dan media sosial.

#### **E. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI, PERKEMBANGAN, DAN PENGARUH TERHADAP PENERAPAN KEUANGAN KEBERLANJUTAN.**

BPRS menyadari bahwa dalam penerapan keuangan Keberlanjutan diperlukan persiapan dan



penyesuaian, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan keuangan Keberlanjutan di tahun 2024 antara lain:

1. BPRS masih fokus pada penyaluran dana dan penyehatan kolektibilitas pembiayaan sehingga terdapat rencana aksi keuangan Keberlanjutan yang belum terealisasi sesuai target.
2. Kurangnya referensi terkait penyusunan pedoman kebijakan keuangan Keberlanjutan.
3. Tahun 2024 merupakan tahun pertama pembuatan dan pelaksanaan program keuangan Keberlanjutan sehingga masih membutuhkan pemahaman yang lebih matang sehingga, BPRS berupaya memperkaya referensi program keuangan Keberlanjutan melalui kegiatan seminar yang diselenggarakan pihak eksternal.

## BAB VI KINERJA KEBERLANJUTAN

### A. KEGIATAN MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN

BPRS berkomitmen untuk menerapkan prinsip keberlanjutan pada semua aktivitas dan setiap jenjang organisasi. Karena itu, BPRS mulai berupaya untuk membangun budaya keberlanjutan pada setiap jenjang organisasi, mulai dari staf hingga jajaran manajemen. BPRS mulai menyusun inisiatif untuk membangun budaya keberlanjutan di internal.

Dalam hal kepedulian terhadap lingkungan hidup, BPRS terus mengembangkan berbagai perangkat pendukung operasional yang mengurangi kuantitas penggunaan kertas dan mengoptimalkan penggunaan energi listrik dan air. Selain itu, BPRS mengajak seluruh karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam program keberlanjutan melalui berbagai himbauan yang diterbitkan seperti; memastikan perangkat komputer dimatikan setelah karyawan selesai bekerja, menggunakan perangkat elektronik dan air sesuai kebutuhan. Pada aspek sosial, BPRS melaksanakan secara rutin program bakti sosial kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional BPRS. Keseluruhan hal tersebut dibarengi dengan upaya yang dilakukan BPRS untuk menumbuhkan budaya sadar risiko pada setiap karyawan.

### B. KINERJA EKONOMI

Sejalan dengan penerapan keuangan Keberlanjutan, BPRS berupaya untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Pada tahun 2024 segmentasi pembiayaan di BPRS didominasi oleh pembiayaan UMKM yaitu sebesar 93,70% atau Rp 40.898 juta, sedangkan untuk pembiayaan Non UMKM sebesar 6,30% atau Rp 2.751 juta. BPRS juga berperan aktif di dalam melayani kebutuhan keuangan pengusaha mikro yang beroperasi di pasar-pasar tradisional. Dengan edukasi yang secara rutin dilakukan oleh BPRS, pedagang pasar diajak untuk mempersiapkan kebutuhan dana di masa mendatang dengan menempatkan dana nasabah dalam bentuk tabungan di BPRS. Di samping itu, BPRS juga membuka kesempatan kepada pedagang pasar untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan modal kerja usaha tanpa agunan dalam rangka meningkatkan taraf kehidupannya.

Pada tahun 2024, BPRS membukukan rugi sebesar Rp 746 juta atau turun sebesar 33% dari tahun 2023 yaitu Rp 1.115 juta. Penurunan rugi ini disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan margin dan bagi hasil pembiayaan.

Berikut disampaikan pencapaian kinerja ekonomi BPRS 3 tahun terakhir (dalam juta).

URAIAN	2024			2023			2022		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
ASSET	62.914	55.677	88,49	62.661	50.190	80,09	80.929	49.460	61,11
PYD	56.935	43.649	76.66	45.636	40.782	89,38	55.112	30.161	54,72
TABUNGAN	8.092	7.048	87.10	9.167	5.739	60,60	16.522	6.167	37,32
DEPOSITO	34.620	32.092	92.70	36.661	24526	66,89	44.352	26.946	60,75
PENDAPATAN	6.412	2.510	39.14	5.467	2.580	47,19	6.478	3.285	50.71
LABA	436	-746	-171.10	436	-1.115	-255.73	607	245	40.36



Pembiayaan	2024	2023	2022
UMKM	40.898	35.550	28.036
Non UMKM	2.751	5.231	2.124
Jumlah	43.649	40.781	30.160

### C. KINERJA SOSIAL

#### 1. Komitmen memberikan layanan yang setara kepada nasabah:

BPRS berkomitmen untuk memberikan layanan yang setara atas produk dan/atau layanan perbankan yang disediakan, serta menyampaikan informasi produk dan/atau layanan perbankan yang akurat kepada nasabah. BPRS memprioritaskan kenyamanan dan keamanan nasabah dalam bertransaksi. BPRS juga telah mengembangkan produk dan layanan dengan memperhatikan kebutuhan dari para nasabah. Dalam hal menjamin kualitas dan mutu produk yang ditawarkan, BPRS juga selalu menerima saran dan masukan untuk peningkatan mutu serta memperhatikan dan menanggapi dengan baik keluhan nasabah sesuai dengan pedoman layanan.

#### 2. Ketenagakerjaan

##### a. Kesetaraan kesempatan bekerja

BPRS menyadari bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan aset penting dalam rangka mempertahankan dan mendukung strategi bisnis jangka panjang. Dalam proses rekrutmen, pengembangan kompetensi serta pengembangan karir, BPRS memberikan peluang yang sama dan setara bagi semua orang tanpa memandang suku, etnis, agama, *gender*, dan lainnya. Dalam periode pelaporan tidak terdapat diskriminasi dan tidak terdapat tenaga kerja paksa serta tenaga kerja anak.

##### b. Remunerasi karyawan.

Pemberian remunerasi untuk karyawan diberikan berdasarkan level jabatan, kinerja dan dipastikan tidak ada diskriminasi terkait suku, etnis, agama, *gender*, dan lainnya. Semua pemberian remunerasi karyawan pada tingkat terendah terhadap upah minimum regional di atas 100%.

##### c. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan layak untuk seluruh karyawan.

Lingkungan kerja yang layak mencakup berbagai fasilitas yang disediakan BPRS untuk menunjang proses kerja. BPRS juga mendorong aspek kesehatan dan keselamatan kerja untuk menjaga eksistensi dan keberlanjutan usaha. Semua SDM BPRS diikutkan penjaminan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

##### d. Pelatihan dan pendidikan

Untuk dapat meraih pertumbuhan usaha yang Keberlanjutan dibutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan kompetensi dan kapasitas yang tinggi. Karena itu, BPRS berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki SDMnya dengan menjalankan program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, meningkatkan keterampilan, kepemimpinan, profesionalisme dan membangun sikap mental positif. Selama tahun 2024, BPRS telah melakukan pendidikan dan pelatihan sebanyak 33 kali yang diikuti oleh 165 karyawan baik kontrak maupun tetap.

3. Bersinergi dengan Masyarakat.

a. Kegiatan literasi dan inklusi keuangan

Pentingnya edukasi keuangan saat ini sangat diperlukan karena memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat. Konsep terpenting dari Program Literasi Keuangan adalah bagaimana masyarakat dapat memiliki pemahaman secara benar mengenai manfaat dan risiko produk serta layanan jasa keuangan, dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, dan mengetahui hak serta kewajiban juga meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan. Program literasi keuangan juga memberikan manfaat besar bagi sektor jasa keuangan karena semakin banyak masyarakat mendapatkan edukasi keuangan, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan. Di tahun 2024, BPRS telah melaksanakan program edukasi literasi kepada masyarakat di seluruh wilayah kerja operasional BPRS sebanyak 4 kali.

b. Mekanisme pengaduan

Media pengaduan nasabah adalah sarana yang dapat digunakan nasabah maupun masyarakat untuk mengajukan pengaduan mengenai produk dan layanan yang diberikan oleh BPRS.

1) Media Pengaduan Lisan

Media pengaduan nasabah secara lisan/chat wa dapat disampaikan secara langsung nasabah ke petugas BPRS dengan hadir secara langsung ke jaringan kantor layanan atau melalui telpon dan handphone/wa masing-masing kantor layanan (dalam jam kantor) yaitu :

- Kantor Pusat	0271-782223	atau	082133930602
- Kantor Kas Gentan	0271-7468251	atau	081225537019
- Kantor Kas Bekonang	0271-6714024	atau	083824549592
- Kantor Kas Solo	0271-743222	atau	082133295246

2) Media Pengaduan Tertulis

a) Media pengaduan secara tertulis yang disediakan oleh BPRS yaitu :

Mengisi formulir pengaduan nasabah melalui petugas Customer Service (CS), Front Office (FO), atau Operasional Kas di seluruh jaringan kantor BPRS.

b) Media pengaduan melalui pengisian formulir pengaduan nasabah dengan datang langsung ke kantor BPRS hanya dapat dilayani selama jam kerja sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku, dan pengelolaan serta pengadministrasiannya menjadi tanggung jawab kantor dimana pengaduan diterima.

BPRS telah menunjuk petugas penanggung jawab pengaduan nasabah, dan melakukan pengadministrasian dan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan otoritas yang berlaku.

Berikut informasi pengaduan di tahun 2024:

Jenis Produk dan/atau Layanan	Jumlah	Status Penyelesaian		
		Selesai	Tidak Selesai	Dalam Proses
Pembiayaan Modal	nihil	nihil	nihil	nihil
Tabungan	nihil	nihil	nihil	nihil
Deposito	nihil	nihil	nihil	nihil
<b>Total</b>	<b>nihil</b>	<b>nihil</b>	<b>nihil</b>	<b>nihil</b>

c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan

BPRS setiap tahun mengalokasikan dana untuk kegiatan sumbangan dan Bakti Sosial. Di tahun 2024 total dana yang dikeluarkan BPRS sebesar Rp 7 juta antara lain:

- 1) Bidang Kemasyarakatan:
  - a) Bantuan kepada yayasan yatim piatu dan warga sekitar kantor BPRS.
  - b) Bantuan perayaan hari besar nasional.
- 2) Bidang keagamaan:
  - a) Bantuan pembangunan dan renovasi tempat ibadah di kampung Klinggen Ngadirejo Kartasura.
  - b) Bantuan pembebasan tanah untuk Lembaga pendidikan RA-MI Wasilatut Taqwa, Mejobo Kudus.

**D. KINERJA LINGKUNGAN HIDUP**

Dampak langsung yang ditimbulkan dari kegiatan usaha BPRS terhadap lingkungan hidup terbilang sangat kecil. Demikian hal nya juga dengan dampak tidak langsung yang ditimbulkan relatif terbatas. Namun demikian, BPRS memiliki komitmen yang tinggi untuk terus menekan dampak operasional terhadap lingkungan hidup dan turut berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan.

Komitmen BPRS terhadap upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan hidup, diantaranya:

1. Kebijakan efisiensi penggunaan sumber energi listrik dan air.
  - a. Perangkat penerangan dan elektronik pada ruang rapat dan ruang kerja yang tidak digunakan wajib dimatikan.
  - b. Lampu kamar mandi dinyalakan seperlunya, atau dimatikan jika kamar mandi tidak digunakan.
  - c. Penggunaan AC pada ruang kerja diatur sebagai berikut.
    - 1) AC dapat dihidupkan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
    - 2) AC harus dalam keadaan mati bila ruang tersebut tidak sedang dipergunakan untuk aktivitas kerja.
  - d. Lampu teras dinyalakan saat hari mulai gelap dan wajib dimatikan pada pagi hari.
  - e. Pengaturan penggunaan lampu papan nama dan neon box seefisien mungkin.
  - f. Pada saat akhir hari seluruh perlengkapan elektronik yang tidak digunakan wajib dicabut dari stop kontak.
  - g. Pengecekan panel dan instansi listrik wajib dilakukan secara berkala.
  - h. Air digunakan seperlunya.
  - i. Pada saat menggunakan kran, dibuka separuh putaran sehingga air yang keluar tidak berlebih.
  - j. Segera mengganti kran/shower yang bocor atau tidak bekerja dengan baik.
  - k. Peralatan pipa air, kran dan penampungan air wajib dirawat dengan baik.
  - l. Kebocoran atau rembesan dari kran, wastafel dan closet wajib segera ditangani.
  - m. Instalasi pipa air yang rusak wajib segera diperbaiki.

URAIAN	2024	2023	2022
Beban Listrik/Gas/PAM (Rp jutaan)	48	43	48

2. Kebijakan efisiensi penggunaan kertas
  - a. Tisu hanya disediakan pada tempat-tempat tertentu, yaitu di kamar mandi, ruang tamu, ruang rapat dan ruang kerja Direksi serta Dewan Komisaris.
  - b. Penggunaan tisu untuk mengeringkan tangan atau wajah disarankan paling banyak 2 (dua) lembar.
  - c. Penggunaan kembali kertas bekas (kertas yang satu sisi bagiannya pernah dipakai namun sisi yang lain masih bersih dan bisa digunakan untuk mencetak) untuk pengajuan berkas yang masih bersifat draft.

URAIAN	2024	2023	2022
Penggunaan kertas (Rp jutaan)	18	18	17

3. Kebijakan pengurangan sampah plastik
  - a. Setiap pelaksanaan rapat dan kegiatan training internal, tidak disediakan air minum kemasan sekali pakai, hanya disediakan galon air minum dimana masing-masing karyawan dihimbau untuk membawa botol air minum secara mandiri.
  - b. Disediakan galon air minum dan gelas di setiap ruang kerja dan ruang rapat.
  - c. Terhadap kegiatan yang melibatkan pihak eksternal maka air minum disajikan menggunakan gelas.

#### E. TANGGUNG JAWAB LAYANAN PRODUK DAN/ATAU LAYANAN KEUANGAN KEBERLANJUTAN

1. Inovasi dan pengembangan produk dan/atau layanan keuangan Keberlanjutan.  
BPRS di tahun 2024 meluncurkan produk-produk baru dalam rangka memberikan pelayanan perbankan yang aman dan nyaman kepada nasabah, serta menyesuaikan dengan kebutuhan aktivitas finansial terkini diantaranya produk MMQ dan produk Multijasa.
2. Dampak produk dan/atau layanan keuangan Keberlanjutan.  
BPRS menyadari bahwa dalam menyalurkan pembiayaan mungkin akan memberi dampak sosial dan lingkungan serta peningkatan risiko terkait. Karenanya BPRS sangat memperhatikan proses identifikasi dan penilaian secara seksama sehingga risiko dapat dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang negatif.
3. Evaluasi keamanan produk dan/atau layanan keuangan Keberlanjutan.  
BPRS menjamin keamanan dan kelayakan berbagai produk dan/atau layanan yang diberikan dan memastikan seluruh produk telah mendapat persetujuan OJK atau otoritas lain. Selain itu, seluruh kegiatan operasional BPRS diawasi oleh OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku.